

## FAKTOR-FAKTOR KUALITAS INFORMASI MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

**RISNAWATI MUSAKKAR**

### ABSTRAK

**Risnawati Musakkar, 2015.** Penulis memilih judul "Faktor-Faktor Kualitas Informasi mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare". Skripsi. (Dibimbing oleh Abdullah selaku Pembimbing I dan Yadi Arodhiskara selaku Pembimbing II). Permasalahan penelitian ini adalah apakah faktor-faktor kualitas informasi telah diterapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah kota Parepare dan kualitas laporan keuangan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah no. 24 tahun 2005. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sesuai atau tidaknya Laporan keuangan pemerintah kota Parepare dengan peraturan pemerintah no. 24 tahun 2005 perihal kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilaksanakan pada bagian keuangan Sekertariat Daerah Kota Parepare dengan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung terhadap 12 (dua belas) responden pada bagian keuangan sekertariat daerah kota Parepare mengenai faktor-faktor kualitas informasi yang tercantum pada peraturan pemerintah no. 24 tahun 2005. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan tentang faktor-faktor kualitas informasi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami dan penerapannya dalam laporan keuangan pemerintah kota Parepare. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kualitas informasi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami telah diterapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

*Kata kunci: kualitas informasi, laporan keuangan.*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang badan pemeriksaan keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, BPK berwenang memeriksa neraca pemerintah Kota Parepare tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, laporan realisasi dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan, laporan keuangan adalah tanggung jawab pemerintah Kota Parepare.

Sebagaimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahun 2012, pemerintah Kota Parepare menyajikan saldo persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 5.532.673.902,49 dan Rp. 6.009.603.015,00. Nilai tersebut merupakan nilai persediaan yang dilaporkan oleh Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) dari 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Parepare atas penyajian persediaan per 31 Desember 2012, tidak dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut atas penyajian persediaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp. 957.225,02, RSUD Andi Makasau sebesar Rp. 409.664.960,00.

Dinas Pekerja Umum sebesar Rp. 1.227.915.800,00, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil sebesar Rp. 102.379.200,00, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebesar Rp. 365.340.00, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 518.143.486,49. Penyimpangan barang persediaan SKPD tidak melaksanakan pencatatan secara tertip dan tidak membuat laporan mutasi barang maupun kartu *stock*. catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai atas kewajaran nilai persediaan per 31 Desember 2012.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya informasi yang belum terungkap sesuai dengan Standar Akuntansi maka informasi keuangan harus disajikan secara lengkap

hal ini menunjukkan masih terjadi ketidak sesuaian informasi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah SKPD.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini lebih menfokuskan pada kualitas informasi laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare yaitu pada Sekertaris Daerah Kota Parepare. Dengan mengajukan judul penelitian: ***“Faktor-Faktor Kualitas Informasi mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare”***.

## B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan faktor-faktor kualitas informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan Faktor-faktor kualitas informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan bahan referensi serta masukan bagi semua pihak khususnya di Kota Parepare menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kota Pare

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori:

#### 1. Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Jadi ada suatu proses

Data merupakan raw material untuk suatu informasi. Perbedaan informasi dan data sangat relatif tergantung pada nilai gunanya bagi manajemen yang memerlukan. Suatu informasi bagi level manajemen tertentu bisa menjadi data bagi manajemen level di atasnya, atau sebaliknya.

Teori kegunaan Informasi (*Decision-Usefulness Theory*) Penelitian ini menggunakan teori kegunaan informasi (*decision-usefulness theory*). Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan (*decision usefulness*) adalah Chambers (1992) yang menyatakan oleh karenanya, akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi; seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar pembuatan keputusan atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi keputusan. Sistem yang menyajikan informasi secara formal akan menyesuaikan dengan dua dalil umum. Pertama adalah kondisi dari setiap wacana ilmiah, sistem seharusnya secara logika konsisten; tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses lainnya. Kedua muncul dari pemakai laporan akuntansi sebagai dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik, informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan (dalam Belkoui, 2001).

Staubus (2000) dalam Kiswara (2011) menyatakan teori kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of*

*Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku di Amerika Serikat. Staubus (2003) dalam Kiswara (2011) menyatakan pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu *a theory of accounting to investors*. Selain FASB, ada sebuah badan yang setara dengan FASB yaitu GASB. FAF membuat GASB pada tahun 1984 dalam hubungan “kakak-adik” dengan FASB.

## 2. Kualitas Informasi

Huang, *et al.* (1999) dalam Lillrank (2003) mendefinisikan 15 dimensi kualitas informasi yang dikelompokkan menjadi empat kelas:

- a. kualitas intrinsik: akurasi, obyektivitas, *believability*, dan reputasi.
- b. kualitas aksesibilitas: akses, dan keamanan,
- c. kualitas kontekstual: relevansi, nilai tambah, ketepatan waktu, kelengkapan dan jumlah data, dan
- d. kualitas representasi: interpretasi, kemudahan pemahaman, representasi ringkas, dan perwakilan konsisten.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

### 1). Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

### 2). Andal

Informasi Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a) Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*) Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- c) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3). Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4). Dapat dipahami

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## B. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset yang merupakan sumber ekonomi yang di harapkan memberikan manfaat usaha di hari tua, dan kewajiban yang merupakan segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan uang yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) PP 24 tahun 2005 merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Manfaat Laporan Realisasi Anggaran yaitu menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- 3) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
- 4) Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

## 2. Laporan Neraca

Menurut PSAP ( PP 24 tahun 2005 ) Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas.

Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode akuntansi (triwulan, caturwulan, atau tahunan).

Asset adalah harta yg dimiliki perusahaan yg berperan dalam operasi perusahaan misal kas persediaan aktiva tetap aktiva yg tak terwujud dan lain-lain. Menurut *Accounting Principal Board* (APB) Statement (1970:132) dikemukakan bahwa kekayaan ekonomi perusahaan termasuk didalam pembebanan yg ditunda yg dinilai dan diakui sesuai prinsip akuntansi yg berlaku. Kewajiban/utang (*Liabilities*).

Menurut definisi yg diberikan oleh APB bahwa : “kewajiban ekonomis dari suatu perusahaan yg diakui dan dinilai se sesuai prinsip akuntansi. Kewajiban disini termasuk juga saldo kredit yg ditunda yg bukan merupakan utang atau kewajiban.” Modal Pemilik (*Owner's Equity / Ekuitas*).

*Equity* adalah suatu hak yg tersisa atas aktiva suatu lembaga (*entity*) setelah dikurangi kewajibannya. Kategori modal bagi tiap perusahaan dapat berbeda yaitu pada perusahaan perseorangan nilai modal ini merupakan modal pemilik sendiri. Sedangkan dalam perusahaan perseroan terdiri dari modal setor dan modal dari pendapatan (*retained Earnings*).

## 3. Laporan Arus Kas.

Arus kas (*cash flow*) adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode.

Menurut PSAP (PP 24 tahun 2005 ) Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu (biasanya satu tahun buku).

Laporan arus kas (*cash flow*) mengandung dua macam aliran/ arus kas yaitu :

a. *Cash in flow*

*Cash in flow* adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas (penerimaan kas). Arus kas masuk (*cash in flow*) terdiri dari hasil penjualan produk/jasa perusahaan, penagihan piutang dari penjualan kredit, penjualan aktiva tetap yang ada, penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas, pinjaman/hutang dari pihak lain, penerimaan sewa dan pendapatan lain.

b. *Cash out flow*

*Cash out flow* adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas keluar (*cash out flow*) terdiri dari :

- 1). Pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya pabrik lain-lain.
- 2). Pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan.
- 3). Pembelian aktiva tetap.
- 4). Pembayaran hutang-hutang perusahaan.
- 5). Pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan.
- 6). Pembayaran sewa, pajak, deviden, bunga dan pengeluaran lain-lain.

Laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari perusahaan dari suatu periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Menurut PSAP (PP 24 Thn 2005) Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

- a) Aktivitas Operasi
- b) Aktivitas Investasi
- c) Aktivitas Pendanaan

C. Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis yang diambil adalah Diduga Faktor-faktor kualitas informasi telah diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare pada Kantor Walikota Parepare pada bagian sekretaris daerah (SEKDA) dan penelitian ini dilaksanakan selama empat (4) bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni Tahun 2014.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan semata-mata untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan yaitu:

1. Observasi adalah sebagai pengamatan dengan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan.

2. *Interview* adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada pertanyaan responden dan jawaban responden dicatat atau direkam.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (*case records*) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.

#### C. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare, Adapun definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor kualitas informasi adalah Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.
2. Laporan Keuangan Daerah adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.
3. PP 24 Tahun 2005 adalah laporan pemerintah tentang SAP, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai suatu pedoman pelaksanaan akuntansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

#### D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode observasi.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

2. Sumber Data

Suharsimi Arikunto (2010) menklasifikasikan sumber data menjadi tiga yaitu:

- a. *Person* (orang) adalah tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang sedang diteliti.
- b. *Paper* (kertas) adalah berupa dokumen, keterangan, arsip, pedoman, surat keputusan (SK) dan sebagainya.
- c. *Place* (tempat): sumber data keadaan ditempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan penelitian

#### E. Teknik Analisis Data

Sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang ( ) dalam penelitian ini dan juga sebagai pembuktian hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis ini digunakan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran penerapan faktor-faktor kualitas informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Parepare.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian

hasil penelitian yang terdapat pada hipotesis yang pertama penulis kemukakan berdasarkan dugaan Faktor kualitas informasi telah diterapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 pada Bagian Keuangan Sekertaris Daerah (SETDAKO) Kota Parepare, adapun pembahasan hipotesis yang terdapat pada skripsi penulis yaitu:

- 1) Diduga faktor-faktor kualitas informasi telah diterapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Dari dugaan hipotesis yang penulis kemukakan, terkait pada Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami. maka penulis mendapatkan hasil melalui pembuatan kuesiner wawancara langsung kepada para staff yang ada dibagian keuangan dan akuntansi yakni:

- (1) Relevan.

- (a) Setiap laporan keuangan anggaran tahunan tidak bisa dijadikan alat pengoreksi di tahun anggaran yang lalu, di karena setiap anggaran tahunan yang telah dikoreksi dan disahkan Perda atau sudah diaudit kepada BPK, sebab setiap anggaran tahunan yang telah disahkan dan ditanda tangani oleh Walikota akan diserahkan kekantor DPRD untuk dijadikan sebagai bahan untuk dirapatkan kegiatannya. Dalam laporan keuangan yang ditangani bagian keuangan setdako merupakan keseluruhan laporan keuangan yang diterima dari kantor-kantor dinas lainnya.
- (b) Pada laporan keuangan tahun anggaran yang lalu dapat digunakan untuk memprediksi laporan keuangan tahun berikutnya, sebab dari anggaran tahun 2014 bisa diketahui bahwa dengan melihat historis penerimaan dan belanja tahun lalu, dan membandingkan potensi riil yang ada. Dimana potensi belanja tahun lalu dengan tahun berikutnya dapat diketahui bahwa ditahun yang lalu dan berikutnya ada peningkatan dan penurunan dalam belanja tahunan sehingga pemerintah mudah mengetahui ada permasalahan-permasalahan laporan keuangan yang diolah dengan adanya laporan keuangan tahunan yang setiap tahunnya dibuat dan dilaporkan kepada kepala bagian pengelolaan yang diterima dari semua kantor yang ada didaerah Kota Parepare. Dari laporan keuangan tahunan ini pemerintah juga bisa mengetahui setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan setiap anggaran yang dikeluarkan bisa terlihat jelas karena adanya laporan keuangan yang dibuat setiap tahunnya.
- (c) Laporan keuangan pemerintah Kota Parepare disajikan tepat waktu karena laporan keuangan memang seharusnya disajikan tepat waktu guna untuk memudahkan mengetahui ada kendala dalam setiap tahunnya, dalam penyajian laporan keuangan harus betul-betul relevan sehingga dalam penyajiannya tidak ada kesalahan yang terjadi yang mengakibatkan terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan anggaran sehingga dalam penyajian laporan keuangan harus semaksimal mungkin tepat waktu. Setiap penyajian laporan keuangan diberikan salah satu kewenangan dalam pertanggung jawabannya terhadap laporan keuangan yang akan diberikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sesuai dengan hasil penyajian laporan keuangan yang dibuatnya. Dalam penyajian laporan keuangan harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan sehingga dalam penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu dan tidak ada kesalahan yang dibuat.
- (d) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2014 disajikan dengan lengkap, sebab dalam laporan keuangan telah mengikuti SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang dipedomankan pada setiap daerah dan digunakan dalam setiap pembuatan laporan keuangan sehingga



memudahkan dalam pengelolaan anggaran tahunan yang dijadikan sebagai bahan pembuktian kegunaan anggaran. Setiap laporan keuangan yang dibuat dan laporan keuangan mudah dilihat dan diketahui jika terjadi kesalahan dalam menghitung hasil anggaran yang digunakan setiap tahunnya. Dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah yang menggunakan SAP sangat memudahkan untuk pembuatan laporan dan tidak adanya ketidak benaran atau kesalahan yang terjadi dan di yakini kelengkapan dalam pembuatan laporan keuangan.

(2) Andal

- (a) Laporan keuangan pemerintah Kota Parepare disajikan dengan jujur sebab harus sesuai dengan butir-butir yang sah, dimana dalam butir-butir yang telah disahkan tidak boleh dilanggar sebab jika dalam pengelolaan laporan keuangan tidak sesuai dengan butir-butir atau peraturan-peraturan yang telah ditentukan maka dalam penyajian laporan keuangan yang telah dibuat tidak diterima sehingga laporan keuangan itu tidak sah. Setiap laporan keuangan yang dibuat harus dengan kejujuran guna untuk memberikan manfaat yang dapat menjadikan suatu daerah bisa berkembang dan bisa memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Dalam penyajian laporan keuangan harus benar-benar andal sehingga tidak menimbulkan adanya penyelewengan anggaran yang dibuat oleh pihak-pihak yang terkait didalam laporan keuangan dan bisa diuji kebenaran dari suatu laporan keuangan dengan laporan keuangan laporan keuangan lainnya.
- (b) Laporan keuangan pemerintah Kota Parepare dapat diuji kebenarannya dengan adanya audit BPK. Yang dilakukan oleh setiap laporan keuangan yang diperiksa apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan SAP ataukah laporan keuangan tersebut tidak mengikuti SAP. Dengan adanya audit BPK memudahkan dalam mengetahui kebenaran setiap penyajian pelaporan yang diberikan kepada bagian BPK.
- (c) Laporan keuangan pemerintah Kota Parepare yang disajikan bersifat netral atau informasi tidak berpihak pada pihak tertentu, sebab informasi laporan keuangan disajikan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan dengan diketahui oleh bagian-bagian pengelolaan dengan mengajukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penyajian informasi laporan keuangan betul-betul mendasar pada transaksi-transaksi yang dilaksanakan sehingga menjadikan suatu laporan keuangan benar-benar dapat dipercaya kebenaran informasinya, dalam pembuatan laporan keuangan berdasarkan pada anggaran yang dikeluarkan dan belanja-belanja lainnya sehingga dalam pembuatan laporan benar-benar netral tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak tertentu yang menjadikan suatu informasi laporan keuangan tidak dipercaya dalam penyajiannya. Pembuatan laporan keuangan tidak mendasar kepada pihak tertentu melainkan laporan keuangan dibuat berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi setiap tahunnya.

(3) Dapat Dibandingkan

- (a) Laporan keuangan pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2014 dapat dibandingkan dengan laporan-laporan keuangan pada periode sebelumnya, laporan anggaran 2014 dapat dibandingkan dengan laporan-laporan keuangan pada periode sebelumnya karena pada perbandingan anggaran 2014 dengan keuangan pada periode sebelumnya bisa memudahkan dalam mengetahui anggaran yang perlu dan yang dapat dikurangi untuk anggaran berikutnya sehingga memberikan kemudahan dalam mengeluarkan anggaran yang tidak terlalu banyak. Pada tahun yang lalu dan tahun sekarang diketahui perbandingan yang berbeda sehingga bisa menjadikan suatu bahan pertimbangan dalam mengelola anggaran.

(b) Laporan keuangan pemerintah Kota Parepare dapat dibandingkan dengan laporan keuangan daerah lain. Setiap daerah memiliki laporan keuangan masing-masing dan telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga dalam pembuatan laporan keuangan masing-masing daerah lebih dimudahkan, jadi perbandingan laporan keuangan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah lainnya dapat membandingkan dari segi laporan keuangannya apakah daerah lain telah mengikuti SAP. Laporan keuangan daerah Kota Parepare dalam perbandingan laporan daerah lain guna untuk bisa lebih meningkat dan lebih baik. Adapun pendapatan daerah antara satu daerah dengan daerah lain berbeda, jadi setiap laporan keuangannya pasti berbeda dari jumlah kegiatan yang dilakukan. Untuk perbandingan laporan keuangan daerah lain hanya untuk mengetahui apakah daerah Kota Parepare sama dengan laporan keuangan daerah lain yang sama-sama mengikuti butir-butir yang ada pada SAP atau ada perbedaan dalam pembuatan laporan lainnya.

(4) Dapat Dipahami

Penyajian laporan keuangan Kota Parepare dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak yang membutuhkan karena dalam pembuatan laporan keuangan sudah ada butir-butir penjelasan yang ada sehingga seluruh pihak yang terkait dapat memahaminya, dan setiap laporan keuangan yang disajikan oleh Kota Parepare sudah sangat jelas sehingga memudahkan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui laporan keuangan pemerintah Kota Parepare. Dalam laporan keuangan pemerintah Kota Parepare dalam penyajiannya sudah ada penjelasan di catatan atas laporan keuangan (CALK).

## B. Pembahasan

Dari hasil laporan keuangan yang penulis dapatkan dari SEKDAKO dimana laporan realisasi anggarannya untuk tahun yang terakhir sampai dengan Per 31 Desember 2014 dan 2013. Pada jumlah aset lancar setelah audit ditahun 2014 sebesar Rp134.344.415.561 dan di tahun 2013 sebesar Rp48.278.938.413, kemudian pada jumlah investasi jangka panjang setelah audit di tahun 2014 Rp14.000.632.221 dan di tahun 2013 sebesar Rp12.612.632.988, pada jumlah aset tetap setelah audit sebesar Rp1.079.300.610.009 dan di tahun 2013 sebesar Rp1.182.052.406.403, pada jumlah aset setelah audit sebesar Rp1.343.118.347.202 dan di tahun 2013 sebesar Rp1.268.664.949.218, pada jumlah kewajiban setelah audit sebesar Rp49.460.353.097 dan di tahun 2013 sebesar Rp55.639.935.184 dan pada jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp1.343.118.347.202 dan di tahun 2013 sebesar Rp1.268.664.949.218.

Jika dilihat dari data hasil audit yang didapat oleh penulis dijelaskan bahwa keseluruhan hasil laporan yang dibuat pada bagian catatan atas laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

Dimana pada relevan diketahui bahwa memang sudah diaudit, sedangkan pada bagian andal laporan keuangan yang dibuat dan kemudian diaudit disajikan dengan jujur sesuai dengan butir-butir, laporan keuangan setelah dibuat kemudian diuji kebenarannya dengan cara audit sesuai pada pembahasan diatas, kemudian pada penyajian laporan dilakukan secara netral, kemudian dapat dibandingkan laporan keuangan setelah audit dan telah dibahas diatas dapat dilihat perbandingan anggaran tahun 2014 dan tahun 2013 telah jelas dan terbukti bahwa penyajian laporan ini benar-benar disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah, dan setelah itu penyajian laporan keuangan juga dapat dipahami sehingga dalam pelaporannya semuanya transparan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Dari keempat faktor yang ada diatas telah menjelaskan masing-masing penjelasan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah Kota Parepare terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, sudah benar karena semua laporan keuangan yang ada

pada Kota Parepare semuanya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Undang-undang.

Jadi pada hipotesis yang penulis kemukakan terkait dengan dugaan Faktor-faktor kualitas informasi telah diterapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare “diterima”.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare telah menerapkan faktor-faktor kualitas informasi yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami yang tercantum pada PP 24 tahun 2005.

### **REKOMENDASI**

Dalam penelitian ini direkomendasikan terhadap peneliti selanjutnya agar dalam melakukan penelitian dapat menambahkan variabel yang dapat menjadikan masukan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah Kota Parepare berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Karena dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga dapat mengambil kesimpulan mengenai laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

### **SARAN**

Dari data dan informasi serta kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan mengajukan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Parepare, terutama pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Parepare mengenai Peraturan pemerintah no. 24 tahun 2005 tentang kualitas laporan keuangan lebih di terapkan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah kota parepare lebih efektif dan efisien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Ruskandi.
- Badjuri, Achmad dan Elisa, Trihapsari. 2004. *Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah*.
- Belkaoui, Ahmed R. 2001. *Teori Akuntansi*, Edisi 4, Jilid 2. Alih Bahasa Mawinta, Hajayanti Widiastuti, Heri Kurniawan, Alia Arisanti. Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hal 127.
- Chambers. R. 1992. *Penilaian Pedesaan: Rapid, Relaxed, dan Partisipatif*. Sussex, UK: Institut Studi Pembangunan.
- Fakultas Ekonomi Umpar, 2013, *Panduan Penulisan dan Penyusunan Skripsi*, Umpar, Parepare
- Indriasari dan Nahartyo .2008. pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten ogan ilir). skripsi

- Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tentang standar Akuntansi pemerintah. Jakarta.
- Kiswara, Endang, 2011, *Nilai Relevan Dan Reliabilitas Kegunaan-Keputusan Informasi Akuntansi Menurut Sfac No. 2 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dengan Metode-Metode Pembebanan Pajak Penghasilan Berbeda*. PhD thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lillrank, Paul. 2003. "Kualitas informasi", *International Journal of Kualitas Keandalan & Manajemen* Vol. 20 No 6 hlm 691-703.
- Nugraha dan Susanti .2010. Penelitian pengaruh sistem pengendalian internal terhadap reliabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. skripsi
- Pemerintah RI, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Direktorat Jendral Ekonomi Daerah, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Direktorat Jendral Ekonomi Daerah, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Stross , Randall E. ( 2007) . Menlo Park itu ahli dari: Bagaimana Thomas Alva Edison Menciptakan Dunia Modern . mahkota
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta
- Surakhmad, Winarno, 1994. *Pengantar penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Mandarin Indonesia. Bandung Tarsito
- Tenriola, Andi Ananda. 2014. *analisis pertanggungjawaban bendahara umum daerah terhadap penerapan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 pada pemerintah kota Parepare*. Universitas Muhammadiyah Parepare. skripsi
- Winidyaningrum dan Rahmawati. 2010. *pengaruh sumber daya manusia dan informasi teknologi pemanfaatan kehandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian internal akuntansi*. Universitas Diponegoro Semarang. Skripsi.